

Analisis Kebijakan dan Kekuasaan pada Pendidikan

¹Mohamad Fatih, ²Cindya Alfi, ³Syamsul Hadi

¹ Universitas Negeri Malang, ²Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

³ Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: ¹ mohamad.fatih.2221039@students.um.ac.id,
mohamadfatih@unublitar.ac.id, fatih.azix@gmail.com ,

² cindyalfi22@gmail.com, ³syamsul.hadi.ft@um.ac.id,

Abstrak: Kekuasaan dan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan kekuasaan membentuk hasil dari proses kebijakan. Selain itu, karena hubungan kekuasaan dilembagakan dalam sistem sekolah, administrator sekolah memiliki kekuasaan melalui posisi organisasi mereka. Melalui kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan dengan kebijakan dan kekuasaan di pendidikan dan di sekolah. Kekuasaan mereka pada akhirnya terletak pada institusi mereka dan kebijakan serta tradisi dibalikannya, bukan pada karakteristik pribadi mereka. Ketika otoritas mereka melemah, pendidik harus belajar menggunakan jenis kekuasaan lain, dan memahami hubungan kekuasaan dalam lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, mengembangkan pemahaman tentang kekuasaan sangat penting bagi para pemimpin pendidikan

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-04-2023

Disetujui pada : 20-04-2023

Dipublikasikan pada : 30-04-2023

Kata Kunci:

Analisis, Kebijakan dan Kekuasaan, Pendidikan

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v7i2.642

PENDAHULUAN

Berkenaan dengan kekuasaan terdapat banyak sektor yang terkait, misalnya sektor publik, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga, budaya, lingkungan dan lainnya. Kekuasaan dapat dimiliki oleh individu atau kelompok. Kekuasaan melekat terkait kewenangan untuk mempengaruhi melakukan sesuatu sesuai tujuan dan maksud serta kesepakatan. Kekuasaan mempunyai masa, tergantung pada jenis kekuasaan yang melekat pada diri seseorang atau kelompok.

Kekuasaan dan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan kekuasaan membentuk hasil dari proses kebijakan. Selain itu, karena hubungan kekuasaan dilembagakan dalam sistem sekolah, administrator sekolah memiliki kekuasaan melalui posisi organisasi mereka. Mereka memiliki kekuasaan itu untuk menjalankan kebijakan pendidikan pemerintah yang berkaitan dengan sekolah dan sistem persekolahan. Mereka juga secara teratur berinteraksi dengan individu dan kelompok yang kuat, banyak dari mereka ingin mempengaruhi atau menghindari kebijakan itu. Oleh karena itu, semua pemimpin sekolah harus memahami kekuasaan dan masalah kompleks yang ditimbulkannya

Kekuasaan atau kewenangan individu atau kelompok yang dijalankan dapat membawa dampak baik atau buruk terhadap lingkungan sosial atau fisik. Jika kewenangan yang dimiliki individu atau kelompok buruk maka dampak yang ditimbulkan akan buruk terkait kebijakan yang dijalankan. sebaliknya jika kebijakan melalui kewenangan yang dimiliki individu dan kelompok berpihak pada kebaikan maka dampak yang ditimbulkan akan baik pula. Semakin banyak kewenangan yang dimiliki seseorang semakin pula menimbulkan penyelewengan dalam penerapannya kewenangan.

Karena kekuasaan adalah suatu hubungan, ia selalu ada dalam konteks sosial yang konkrit. Seorang aktor yang relatif kuat dalam satu konteks mungkin tidak dalam konteks lain. Misalnya, seorang pengawas mungkin berkuasa di komunitasnya tetapi memiliki sedikit kekuasaan dengan badan legislatif negara bagian. Hubungan kekuasaan mungkin simetris atau asimetris. Aktor-aktor yang memiliki derajat kekuasaan yang sama

berhubungan secara simetris, memiliki hubungan “kekuasaan bersama” (Crosby & Bryson, 2005) .

Hubungan simetris, orang biasanya menggunakan persuasi dan tawar-menawar dengan sumber daya ekonomi. Aktor dengan jumlah sumber daya yang berbeda secara signifikan memiliki hubungan kekuasaan yang asimetris. Meskipun mereka mungkin menggunakan persuasi atau tawar-menawar, aktor yang lebih kuat juga dapat menggunakan kekuatan, banding ke otoritas, atau strategi penghargaan dan hukuman untuk mempengaruhi aktor yang kurang kuat. Bahkan dalam hubungan yang sangat asimetris, bagaimanapun, aktor yang lebih lemah jarang tidak berdaya. Berbagai bentuk perlawanan tersedia bagi mereka. Misalnya, guru yang membenci program pengujian baru legislatif negara bagian mungkin menemukan cara untuk menyebutnya

HASIL dan PEMBAHASAN

Jenis dan sumber kekuatan utama.

Model Kekuatan tiga dimensi. Karena kekuasaan adalah subjek yang populer untuk penelitian, banyak teori tentang hal itu telah dikemukakan. Lukes (2005) dan Gaventa (1980) mengembangkan model kekuasaan tiga dimensi yang mencakup semua teori utama, termasuk teori Weberian Bendix (1960) dan Wrong (1995) yang diringkaskan. Tabel 1 merangkum tiga dimensi kekuasaan yang dibahas dalam bagian ini. Meskipun ketiga dimensi kekuasaan, jenis kekuasaan, dan sumber daya disajikan secara terpisah, kehidupan nyata lebih kompleks daripada model buku teks. Di sebagian besar pengaturan sosial, ketiga dimensi beroperasi secara bersamaan, dan beberapa jenis kekuasaan digunakan.

Dimensi pertama Kekuatan, penggunaan Kekuatan secara eksplisit. Dimensi pertama kekuasaan terdiri dari latihan kekuasaan yang eksplisit, yang seringkali dapat diamati secara langsung. Misalnya, badan legislatif negara bagian menggunakan Kekuatan dimensi pertama secara kasat mata ketika mengesahkan undang-undang yang membuat persyaratan kelulusan lebih ketat. Namun, beberapa latihan kekuatan dimensi pertama tidak dapat diamati secara langsung; meskipun demikian, mereka dapat dengan mudah disimpulkan dari bukti yang dapat diamati. Misalnya, di banyak sekolah, guru tidak tetap melakukan banyak pekerjaan ekstra, seperti tarian pendamping dan klub sponsor. Kepala sekolah mereka meminta mereka untuk melakukan tugas-tugas ini karena guru-guru ini berada dalam situasi genting dan lebih cenderung mengatakan "ya" daripada tetap

Memaksa. Ada dua jenis kekuatan: kekuatan fisik dan kekuatan psikis. Menjalankan kekuasaan melalui kekuatan fisik melibatkan penggunaan, atau ancaman untuk menggunakan, tindakan fisik untuk memaksakan kehendak seseorang pada orang lain. Tindakan tersebut termasuk membunuh, melukai, atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain; membatasi kebebasan orang lain; mencegah orang lain memenuhi kebutuhan biologis dasar; dan menggunakan tubuh seseorang untuk menghalangi gerakan orang lain.

Contoh kekuatan fisik dalam pendidikan termasuk hukuman fisik, ruang tahanan, dan skorsing di sekolah. Kekuatan psikis digunakan untuk merusak konsep diri orang lain. Bentuk umum termasuk penghinaan verbal atau simbolis, omelan, gosip jahat, dan stereotip negatif seluruh kelompok. Meskipun penggunaan kekuatan psikis tidak pernah etis, itu umum di semua tingkat pendidikan (Wrong, 1995).

Dominasi Ekonomi. Menurut Weber (1986), dua jenis kekuasaan sangat penting dalam masyarakat modern: dominasi ekonomi dan otoritas. Dominasi ekonomi melibatkan penggunaan pengaruh seseorang atas pekerjaan, karier, atau kemakmuran ekonomi orang lain untuk memengaruhi perilaku mereka. Siapa pun yang berada dalam posisi untuk merekrut, memecat, mengevaluasi, atau mempromosikan karyawan memiliki akses ke jenis kekuasaan ini, seperti halnya mereka yang cenderung menjadi diminta untuk menulis rekomendasi pekerjaan. Bentuk lain dari dominasi ekonomi adalah menggunakan pengaruh seseorang atas kondisi kerja seperti jadwal, tugas pekerjaan, dan tanggal liburan untuk mendorong orang menuruti keinginannya. Pada skala yang lebih luas, beberapa perusahaan menggunakan dominasi ekonomi mereka

untuk mendapatkan pengurangan pajak dan konsesi lain dari pemerintah daerah dengan mengancam akan pindah, mengambil pekerjaan bersama mereka

Otoritas. Otoritas beroperasi ketika seseorang mengamati "pengakuan yang tidak perlu dipertanyakan lagi oleh mereka yang diminta untuk patuh; tidak diperlukan paksaan atau bujukan (Arendt, 1986, hlm. 65). Otoritas tergantung pada legitimasi, keyakinan bahwa orang yang berwenang memiliki hak atas kekuasaan khusus. Mahasiswa kekuasaan mengidentifikasi beberapa macam otoritas. Otoritas patriarki adalah satu; istilah yang lebih kontemporer adalah otoritas orang tua.

Karena kebanyakan orang tumbuh dalam keluarga, mereka pertama kali mengalami kekuatan dalam hubungan mereka dengan orang tua dan kerabat lainnya. Di sebagian besar keluarga, orang berasumsi bahwa orang tua dan anggota keluarga lain yang lebih tua memiliki hak untuk menjalankan Kekuasaan atas anak-anak karena hak ini didasarkan pada tradisi. Karena itu, anak-anak biasanya menerimanya sebagai hal yang wajar. Orang sering mentransfer elemen otoritas orang tua ke pengaturan lain, terutama di sekolah dasar, di mana anak-anak dapat memproyeksikannya ke guru dan kepala sekolah (Bendix, 1960)

Bentuk kedua adalah otoritas hukum, yang diberikan kepada mereka yang memegang posisi tanggung jawab dalam suatu organisasi. Otoritas hukum biasanya dijelaskan dan dibatasi oleh dokumen resmi seperti manual kebijakan dan deskripsi pekerjaan. Selama seorang pemegang jabatan bertindak dalam lingkup otoritas hukum, anggota organisasi lainnya mungkin akan dengan mudah mematuhi. Sebagian besar, hubungan antara guru, kepala sekolah, dan administrator kantor distrik didasarkan pada otoritas hukum (Bendix, 1960)

Otoritas yang kompeten adalah bentuk ketiga. Berdasarkan keahlian, seringkali ini adalah satu-satunya jenis tenaga profesional yang digunakan dengan klien mereka. Hanya sedikit orang yang menentang rekomendasi medis dari dokter mereka atau nasihat hukum dari pengacara. Meskipun pendidik memiliki otoritas yang kurang kompeten dibandingkan dokter atau pengacara, banyak individu guru dan administrator berhasil membangun otoritas kompeten tingkat tinggi di komunitas mereka (Wrong, 1995)

Akhirnya, beberapa orang mampu mempengaruhi perilaku orang lain melalui otoritas karismatik, berdasarkan kualitas pribadi yang murni. Beberapa orang, melalui kombinasi kepribadian, penampilan, dan sikap, membangkitkan kepercayaan dan antusiasme spontan dari orang lain. Contoh paling mencolok dari otoritas karismatik muncul dalam situasi darurat, dan otoritas karismatik dapat menguap segera setelah keadaan darurat berakhir. Pendidik sering menggunakan otoritas karismatik untuk beberapa efektivitas mereka; tetapi karena ini adalah bentuk otoritas yang paling tidak stabil, sangat tidak bijaksana untuk mengandalkannya (Bendix, 1960).

Banyak penulis berpendapat bahwa legitimasi semua bentuk otoritas telah menurun tajam sejak Perang Dunia II. Bukti untuk "krisis legitimasi" ini mencakup sinisme yang meluas tentang pemerintah dan lembaga lain, kenakalan remaja, dan tingkat kejahatan yang meningkat. Pendidik mengalami kemerosotan wibawanya setiap hari, baik di lingkungan pendidikan maupun di luarnya. Dipaksa oleh melemahnya otoritas mereka untuk menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan lain, mereka mungkin merasa tidak nyaman menjalankannya.

Bujukan. Jenis terakhir dari kekuatan dimensi pertama adalah persuasi, upaya terbuka untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan meyakinkan mereka bahwa perilaku yang diinginkan itu baik. Bentuk persuasi yang umum adalah sosialisasi, yang dapat ditawarkan

Kekuasaan digunakan dalam organisasi sekolah membentuk kebijakan pendidikan.

Banyak organisasi membutuhkan karyawan baru untuk berpartisipasi dalam program induksi, yang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan pendatang baru ke norma kelompok (Wrong, 1995). Pada pendidikan, sesi orientasi untuk siswa dan guru baru melayani tujuan ini. Banyak organisasi yang mempengaruhi kebijakan pendidikan juga menggunakan sosialisasi. Misalnya, asosiasi dewan sekolah biasanya

menawarkan program pelatihan untuk anggota dewan yang baru terpilih, dan serikat guru menyediakan konferensi pelatihan bagi para pemimpin lokal.

Bentuk persuasi kedua adalah persuasi rasional, di mana satu individu menyusun argument dan fakta terkait untuk meyakinkan individu lain untuk mengambil tindakan. Akhirnya, persuasi manipulatif dapat digunakan. Di permukaan, persuasi manipulatif tampak seperti persuasi rasional; sebenarnya, itu dimaksudkan. dalam beberapa format. Banyak organisasi membutuhkan karyawan baru untuk berpartisipasi dalam program induksi, yang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan pendatang baru ke norma kelompok (Wrong, 1995). Pada pendidikan, sesi orientasi untuk siswa dan guru baru melayani tujuan ini. Banyak organisasi yang mempengaruhi kebijakan pendidikan juga menggunakan sosialisasi. Misalnya, asosiasi dewan sekolah biasanya menawarkan program pelatihan untuk anggota dewan yang baru terpilih, dan serikat guru menyediakan konferensi pelatihan bagi para pemimpin lokal.

Namun, pembujuk manipulatif menahan fakta penting dari aktor yang mereka coba pengaruhi. Paling sering, informasi tersembunyi berhubungan dengan tujuan sebenarnya dari pembujuk atau dampak yang berpotensi membahayakan dari tindakan yang disarankan (Wrong, 1995). Misalnya, salah satu alasan mengapa banyak guru skeptis tentang penerapan program baru adalah karena mereka telah dibujuk secara manipulatif untuk melakukannya di masa lalu. Seperti kekuatan psikis, persuasi manipulatif selalu tidak etis

Sumber daya. Kekuasaan tergantung pada sumber daya (Mann, 1992). Oleh karena itu, orang-orang yang ingin membangun basis kekuatan melakukannya dengan mengumpulkan sumber daya yang sesuai untuk arena di mana mereka ingin menjalankan kekuasaan. Tabel 2 merangkum sumber daya utama. Karena kekuasaan bersifat kumulatif, orang dan kelompok yang berkuasa biasanya mengendalikan berbagai sumber daya dan dapat menyebarkan beberapa sumber daya secara bersamaan. Meskipun sumber daya ini dapat menjadi penting dalam dimensi pertama kekuasaan, beberapa juga beroperasi di dimensi lain. Dalam pembahasan berikut, hanya beberapa sumber yang dijelaskan secara rinci.

Sumber Daya Bahan. Sumber daya material, yang ditunjukkan pada kolom pertama Tabel 2, sangat penting untuk sebagian besar pelaksanaan kekuasaan. Yang terpenting adalah uang, karena pemiliknya dapat dengan mudah mengubahnya menjadi sumber daya lain (Dahl, 1986; Wrong, 1995). Misalnya, distrik sekolah dengan “peti perang” besar untuk kampanye pendanaan dapat mengubah uang menjadi sumber pengetahuan dengan menyewa konsultan kampanye profesional. Itu juga dapat mengubah uang menjadi akses ke media dengan membeli iklan surat kabar dan iklan televisi dan radio. Menggunakan kontrol atas perekrutan untuk membangun dan menjalankan kekuasaan, atau patronase, sayangnya masih merupakan sumber kekuasaan yang penting di banyak tempat (Dahl, 1986).

Pada studinya tentang pengawas di Timur Laut, Johnson (1996) menemukan bahwa patronase sering digunakan di sekitar sepertiga distrik. Waktu adalah sumber daya material karena hubungan antara waktu dan uang (Wrong, 1995). Karena mayoritas orang menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari untuk mencari nafkah dan melakukan pekerjaan tidak dibayar yang diperlukan untuk rumah tangga mereka, mereka tidak punya waktu untuk membangun dan memelihara basis kekuatan. Beberapa orang yang tidak harus bekerja memiliki keuntungan yang cukup besar.

Di antara individu-individu ini adalah orang kaya yang mandiri; pensiunan orang di pensiun; mahasiswa yang didukung oleh keluarga, beasiswa, atau pinjaman; dan orang-orang yang sudah menikah yang pasangannya berpenghasilan cukup untuk menghidupi mereka. Oleh karena itu, orang-orang dalam kategori sosial ini sering memberikan pengaruh yang tidak proporsional terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan

Sumber Daya Sosial. Bahkan jika seseorang memiliki sumber daya material yang melimpah, memiliki sumber daya sosial juga penting. Orang-orang yang kekurangan sumber daya material yang signifikan dapat mengkompensasi kekurangan ini dengan membangun dan menggunakan sumber daya sosial. Kolom tengah Tabel 2

mencantumkan sumber daya sosial utama. Salah satu sumber daya sosial yang paling penting adalah angka, atau banyak sekutu dan pengikut. Johnson (1996) menjelaskan penggunaan angka yang terampil oleh seorang pengawas. Segera setelah Dick Fitzgerald memulai kecenderungan superinnya, dewan kota memotong anggaran sekolah.

Fitzgerald meminta staf kantor pusatnya untuk pergi ke gedung sekolah untuk memberi tahu para guru tentang masalah tersebut dan mendapatkan dukungan mereka. Atas permintaan pengawas mereka, para guru mengemas pertemuan dewan kota berikutnya; uang dikembalikan ke anggaran. Dampak angka dapat diperbesar oleh organisasi yang efektif. Sebuah organisasi menjadi efektif jika memiliki pemimpin yang terampil dan berkomitmen; prosedur pengambilan keputusan yang dihormati; dan sistem komunikasi yang terencana dan sistematis (Mann, 1992). Hak Beragama telah mampu mempengaruhi kebijakan kurikulum di banyak tempat karena sangat terorganisir (Apple, 2006).

Sumber Daya Pengetahuan. Istilah kekuasaan/pengetahuan dari filsuf Perancis Michel Foucault, yang menyamakan kekuasaan dan pengetahuan, secara gamblang menunjukkan pentingnya pengetahuan sebagai sumber kekuasaan (Fendler, 2010). mencantumkan sumber pengetahuan yang paling penting. Di hampir semua arena, orang dapat membangun kekuatan dengan mengumpulkan informasi terkait. Informasi dapat terdiri dari banyak jenis, termasuk fakta tentang undang-undang yang relevan, komposisi demografis suatu populasi, keadaan opini publik, dan pola pemungutan suara dalam pemilihan umum baru-baru ini. Informasi yang akurat memfasilitasi pengembangan rencana dan program yang realistis.

Penggunaan informasi yang tidak etis untuk membangun kekuasaan termasuk mengumpulkan "kotoran" pada lawan untuk mencoreng reputasi mereka atau memeras mereka. Setelah database informasi telah dibuat, masalah pengendalian informasi muncul. Mereka yang melakukan control atas informasi memperoleh kekuasaan karena mereka dapat memilih dengan siapa mereka berbagi pengetahuan, serta kapan dan bagaimana mereka menggunakannya secara strategis (Wrong, 1995).

Kekuatan Diskursif dalam Dimensi Pertama. Kepemilikan banyak sumber pengetahuan dapat memberikan seseorang kekuatan diskursif yang cukup besar. Dalam dimensi pertama, seperti dalam dua dimensi lainnya, orang menjalankan kekuasaan melalui bahasa, atau wacana. Pada dimensi pertama, bahasa jelas digunakan sebagai instrumen kekuasaan, dan para aktor biasanya menyadarinya. Salah satu teknik kekuatan diskursif yang sering digunakan adalah menghasilkan teks yang dirancang untuk membatasi ruang lingkup diskusi dalam sebuah pertemuan. Orang yang memiliki wewenang untuk menghasilkan teks semacam itu biasanya disebut agenda memiliki alat yang ampuh. Pada sebagian besar pertemuan, peserta lain dapat mengubah agenda, dan terkadang terjadi perdebatan penting seputar amandemen yang disarankan. Meski begitu, orang biasanya ragu untuk mengusulkan perubahan besar-besaran dalam sebuah agenda, apalagi menyarankan untuk ditinggalkan sama sekali.

Waite (1995) mengamati sebuah konferensi di mana Faye, supervisor, datang dengan membawa agenda dalam bentuk checklist karena dia menganggap Bea, guru di bawah supervisi, "argumentatif." Meskipun Faye berusaha mengendalikan diskusi tentang pengajaran Bea dengan daftar periksanya, Bea berhasil menggunakan teknik diskursif lainnya, yang akhirnya menyebabkan penyelia menghentikan semua upaya untuk memengaruhinya. Di antara penggunaan kekuasaan diskursif guru adalah meninggikan suaranya, menyela atasannya, berbicara secara bersamaan dengannya, mengubah topik pembicaraan, dan bangkit dari meja untuk melihat ke luar jendela. Teknik diskursif Bea yang paling sukses adalah serangkaian sindiran yang menunjukkan bahwa Faye tidak berhubungan dengan realitas kelas. Anekdote ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa orang yang memiliki otoritas hukum tidak selalu menang ketika kekuasaan dijalankan.

Dimensi kedua Kekuatan: Mobilisasi Bias. memahami dimensi kedua: balapan. Berbeda dengan dimensi pertama, di mana pelaksanaan kekuasaan bersifat eksplisit, kekuasaan yang dilaksanakan dalam dimensi kedua bersifat implisit. Tabel 1

menunjukkan beberapa cara menjalankan kekuasaan di dimensi kedua Latihan kekuasaan dalam dimensi ini biasanya membatasi partisipasi yang berarti dari kelompokkelompok tertentu atau membatasi isu-isu yang dapat diangkat untuk diperdebatkan melalui perangkat yang kurang jelas daripada agenda (Bachrach & Baratz, 1962; Bachrach & Botwinick, 1992). Cara menjalankan kekuasaan ini disebut mobilisasi bias (Gaventa, 1980)

Dengan kata lain, bias yang kuat terhadap partisipasi mereka telah dimobilisasi. Ketika aturan seperti itu pertama kali ditetapkan, kebanyakan orang memahami tujuan mereka yang sebenarnya. Namun, setelah beberapa dekade berlalu, banyak warga yang tidak melakukannya. Beberapa orang dengan tulus percaya bahwa tes keaksaraan akan memastikan pemilih yang terinformasi; mereka tidak mengenalinya sebagai latihan kekuatan dimensi kedua

Dimensi ketiga Kekuatan, pembentukan kesadaran. memahami pembentukan kesadaran. Pada diskusi tentang dimensi ketiga kekuasaan, Lukes (2005) bertanya, "Bukankah pelaksanaan kekuasaan tertinggi untuk membuat orang lain atau orang lain memiliki keinginan yang Anda ingin mereka miliki yaitu, untuk mengamankan kepatuhan mereka dengan mengendalikan pikiran mereka? dan keinginan?" (hal. 23). Kita semua pernah menjadi penerima dalam dimensi kekuasaan ini, karena kita semua telah mengalami akulturasi yang merupakan urusan utama masa kanak-kanak.

Beberapa institusi sosial sangat penting dalam membentuk kesadaran. Keluarga adalah yang paling penting, sebagian karena orang pertama kali belajar bahasa di dalamnya. Bahasa telah lama dikenal sebagai pembentuk utama kesadaran, yang menentukan kategori dasar makna yang diterapkan seseorang pada dunia (Cherryholmes, 1988). Keluarga juga menanamkan keyakinan dan nilai, dan pola interaksinya membentuk struktur kepribadian anak.

Namun, institusi lain juga membentuk kesadaran. Media massa semakin penting dewasa ini, membombardir setiap orang dengan rentetan pesan, baik yang tersurat maupun yang tersirat (Giroux, 1999). Sekolah dan organisasi keagamaan juga memainkan peran utama dalam membentuk cara orang melihat dunia (Bernstein, 1996; Corson, 1995; Lemke, 1995). Pertanyaanpertanyaan tentang bagaimana kesadaran dibentuk dan bagaimana kesadaran itu dapat diubah menyibukkan diri dengan ilmu sosial kontemporer. Sebuah diskusi menyeluruh tentang subjek ini akan melampaui cakupan teks ini; namun, para pemimpin sekolah harus memahami bahwa banyak orang yang mereka hadapi telah diberdayakan secara luar biasa atau tidak diberdayakan secara luar biasa melalui pembentukan kesadaran mereka yang tidak biasa.

Di antara pesan terpenting yang dikomunikasikan oleh institusi yang membentuk kesadaran adalah pesan tentang siapa yang harus memegang posisi terdepan dalam masyarakat dan siapa yang harus didominasi oleh orang lain. Beberapa orang menerima aliran pesan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hak istimewa, dengan hak alami atas posisi kekuasaan dan prestise. Misalnya, dalam studi etnografinya tentang sekolah persiapan swasta elit yang dia sebut "Akademi Edgewood," Peshkin (2001) menemukan bahwa siswa di sekolah ini dikelilingi oleh simbol-simbol pentingnya mereka. Meskipun sekolah tersebut hanya memiliki 900 siswa, fasilitasnya yang "murni" dan "elegan" terletak di kampus seluas 312 hektar.

Selain itu, sekolah tersebut memiliki lahan pegunungan seluas 270 hektar di mana siswa terlibat dalam "pendidikan pengalaman." Edgewood merekrut guru-gurunya banyak di antaranya bergelar PhD dalam pencarian nasional, dan setiap anggota fakultas memiliki kantor yang lengkap dengan komputer pribadi. Perpustakaan sekolah memiliki sembilan staf, catatan katalog online, dan pembaca microfiche. Di antara kunjungan lapangan yang ditawarkan adalah perjalanan dua minggu ke Paris untuk berlatih bahasa Prancis dalam situasi imersi. Semua simbol ini mengomunikasikan nilai tinggi siswa. Mereka juga secara implisit memberi tahu para remaja ini bahwa mereka adalah pemimpin masa depan masyarakat Amerika.

Pada beberapa kasus, para siswa sepenuhnya menyadari pesan yang dikirimkan sekolah kepada mereka. Ketika Peshkin bertanya kepada seorang siswa apa yang menurut orang tua Edgewood dapat diberikan sekolah kepada anak-anak mereka, dia

menjawab dengan sangat langsung: “Mereka ingin kita berada di puncak rantai makanan. Mereka ingin kita menjadi bos, bukan karyawan.

Ketidakberdayaan yang tidak biasa. Di ujung lain spektrum sosial adalah orang-orang yang secara luar biasa tidak berdaya melalui pembentukan kesadaran. Mereka tumbuh dengan dikelilingi oleh pesan-pesan yang mengomunikasikan status rendah mereka dan kemampuan kepemimpinan yang tidak sesuai.

Banyak pemimpin sekolah negeri bekerja di lingkungan di mana mereka berurusan dengan orang-orang yang tidak berdaya sampai tingkat yang tidak biasa. Ketika seseorang menghadapi sikap apatis yang masif, respons alaminya adalah menjadi marah dan mengeluh tentang kekurangan penduduk, yang seringkali sama dengan menyalahkan para korban.

Para pemimpin sekolah harus mempertimbangkan sikap apatis, fatalisme, merendahkan diri sendiri, dan tanda-tanda lain yang dicatat oleh Gaventa sebagai gejala masalah yang lebih dalam. Refleksi dan sedikit penyelidikan dapat mengungkapkan sejarah tragis yang menjelaskan ketidakberdayaan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menangani masalah seperti itu adalah dengan memulai proyek di mana orang-orang dapat berpartisipasi dan di mana mereka diberdayakan untuk membuat keputusan yang dapat dipercaya. Melalui bekerja dalam proyek semacam itu, mereka memperoleh kepercayaan diri, keterampilan, dan pengetahuan, serta pemahaman yang lebih realistis tentang situasi mereka. Singkatnya, mereka mendapatkan kekuatan. Kemajuan mungkin akan lambat, tetapi dapat dibuat (Bachrach & Botwinick, 1992; Gaventa, 1980). Kekuatan dalam pengaturan pendidikan. Kekuatan Peran Kebijakan Pendidikan.

Kekuatan sebagai sarana dan tujuan

Salah (1995) mengidentifikasi empat tujuan di mana kekuasaan dapat digunakan dan membahas implikasi etis dari masing-masing. Poin-poin utamanya dirangkum di sini. Kekuasaan sebagai sarana individu. Seorang individu dapat menggunakan kekuasaan untuk mengejar tujuan individu. Misalnya, karena alasan keuangan, seorang pengawas yang hampir pensiun mungkin ingin menyelesaikan karirnya di distrik tempat dia bekerja saat ini. Untuk meningkatkan keamanan pekerjaannya, ia dapat membangun kekuatan pribadi di dalam distrik. secara alami. Menulis secara khusus tentang kekuasaan dalam pendidikan, Burbules (1986) menegaskan: Jawaban lain untuk dilema yang ditimbulkan oleh kekuasaan adalah dengan menjalankannya secara sadar Menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan pribadi tidak selalu tidak etis. Meski begitu, lama kelamaan godaan akan semakin kuat untuk mengorbankan kebaikan daerah demi tujuan pribadi. Untuk berperilaku etis, pengawas harus memantau perilakunya dengan cermat untuk memastikan bahwa mengejar tujuan pribadinya selalu konsisten dengan tujuan distrik

Kekuasaan Sebagai akhir Individual. Seorang individu dapat menjalankan kekuasaan semata-mata karena rasa penting yang dia alami saat dia melakukannya. Misalnya, seorang kepala sekolah mungkin senang menunjukkan kekuasaannya atas orang tua, guru, siswa, dan staf dengan membuat keputusan sepihak dan tiba-tiba membalikkannya tanpa penjelasan. Penggunaan kekuasaan seperti itu sebagai tujuan itu sendiri selalu tidak etis.

Kekuatan Sebagai Sarana untuk Sebuah grup. Seorang individu dapat menggunakan kekuasaan untuk memajukan tujuan kelompok. Misalnya, seorang supervisor sains sekunder dapat menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan dana guna membeli peralatan laboratorium bagi guru kimia di distriknya. Dengan asumsi bahwa tujuan kelompok itu etis, penggunaan kekuasaan ini adalah yang paling rentan untuk disalahgunakan.

Menggunakan Kekuatan diskursif secara etis. Wacana, khususnya pidato, selalu menjadi instrumen kekuasaan yang penting bagi para pemimpin sekolah. Dengan diperkenalkannya pengelolaan berbasis lokasi di banyak kabupaten, hal ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Seperti sumber daya lainnya, wacana dapat digunakan baik secara etis maupun tidak etis

Penggunaan kekuatan dalam organisasi sekolah

Menurut bagan, administrator sekolah memiliki dua jenis kekuasaan: dominasi ekonomi dan otoritas hukum. Jenis kekuatan ini dibangun ke dalam sistem untuk administrator. Namun, para pemimpin sekolah yang bijaksana membangun kekuatan mereka dengan bekerja untuk menambah apa yang diberikan sistem kepada mereka. Banyak administrator bekerja untuk membangun otoritas kompeten mereka, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa orang memperoleh gelar doktor untuk tujuan ini; pendekatan lain adalah untuk tetap up-to-date dalam membaca profesional dan bekerja secara aktif di satu atau lebih organisasi profesional.

Administrator juga dapat menetapkan otoritas kompeten mereka dengan menunjukkan dengan jelas alasan pendidikan untuk keputusan yang mereka buat. Kekuatan persuasif juga penting. Mempelajari cara membuat presentasi yang meyakinkan pada pertemuan atau memoles keterampilan menulis agar dapat menyusun rilis berita yang efektif dapat meningkatkan kekuatan pemimpin sekolah, seperti halnya upaya serius untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang komunitas dan penduduknya. Administrator dapat menggunakan jenis kekuasaan lain dan memperoleh sumber daya lain, tetapi mereka tidak diberikan; mereka harus dicapai

KESIMPULAN

Kekuasaan dan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan kekuasaan membentuk hasil dari proses kebijakan. Selain itu, karena hubungan kekuasaan dilembagakan dalam sistem sekolah, administrator sekolah memiliki kekuasaan melalui posisi organisasi mereka.

Mereka memiliki kekuasaan itu untuk menjalankan kebijakan pendidikan pemerintah yang berkaitan dengan sekolah dan sistem persekolahan. Dalam melakukannya, mereka juga secara teratur berinteraksi dengan individu dan kelompok yang kuat, banyak dari mereka ingin mempengaruhi atau menghindari kebijakan itu. Oleh karena itu, semua pemimpin sekolah harus memahami kekuasaan dan masalah kompleks yang ditimbulkannya.

Kekuasaan meresapi sistem pendidikan dan kebijakan yang membentuknya. Sebagian besar kekuasaan itu dipegang oleh pegawai individu dari sistem, bertindak dalam kapasitas mereka sebagai pejabat pemerintah. Kekuasaan mereka pada akhirnya terletak pada institusi mereka dan kebijakan serta tradisi di balik mereka, bukan pada karakteristik pribadi mereka. Secara tradisional, sebagian besar kekuasaan yang dipegang oleh lembaga pendidikan adalah otoritas sejenis kekuasaan yang dianggap benar dan sah oleh masyarakat.

Namun, otoritas bertumpu pada legitimasi, dan legitimasi mudah hilang. Pada abad kedua puluh satu, legitimasi semua otoritas bahwa meskipun Tony cenderung mendengarkan pendapat semua orang dalam rapat, dia kemudian membuat keputusan secara sepihak. Robinson menyimpulkan bahwa mengecualikan suara dan gagal memimpin kelompok ke keputusan yang tepat adalah penyalahgunaan kekuasaan diskursif. termasuk otoritas pendidikan dalam krisis. Ketika otoritas mereka melemah, pendidik harus belajar menggunakan jenis kekuasaan lain, dan memahami hubungan kekuasaan dalam lingkungan kebijakan mereka menjadi lebih penting dari sebelumnya. Oleh karena itu, mengembangkan pemahaman tentang kekuasaan sangat penting bagi para pemimpin pendidikan

DAFTAR RUJUKAN

- Alexander, Nicola A. (2013). Policy analysis for educational leaders a step-by-step approach. Boston: Pearson.
- Apple, M. W. (1985). Education and power. Boston: Ark Paperbacks.
- Apple, M. W. (2006). Educating the "right" way (2nd ed.). New York: Routledge.
- Arendt, H. (1986). Communicative power. In S. Lukes (Ed.), Power (pp. 59–74). New York: New York University Press.

- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two faces of power. *American Political Science Review*, 56, 947–952.
- Bachrach, P., & Botwinick, A. (1992). *Power and empowerment*. Philadelphia: Temple University Press
- Bardach, E. & Patashnik, E. (2016). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving*, 5th edition. Los Angeles: Sage
- Bendix, R. (1977). *Max Weber*. Berkeley, CA: University of California Press
- Bernstein, B. (1996). *Pedagogy, symbolic control, and identity*. London: Taylor & Francis.
- Burbules (1986) Burbules, N. C. (1986). A theory of power in education. *Educational Theory*, 36, 95–114
- Corson, D. (1993). *Language, minority education and gender*. Clevedon, U.K.: Multilingual Matters.
- Corson, D. (1995). Discursive power in educational organizations: An introduction. In D. Corson (Ed.)
- Crosby & Bryson. (2005). *Tackling Public Problem in Share Power World: Second Edition*. San Francisco: Jossey-Bass
- Dahl, R. (1984). *Modern political analysis* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Dahl, R. (1986). Power as the control of behavior. In S. Lukes (Ed.), *Power* (pp. 37–58). New York: New York University Press
- Fowler, Frances C. 2014. *Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction*. Fourth Edition. Harlow: Pearson Education Limited
- Gaventa, John. (1980). *Power and Powerlessness*, University of Illinois Press
- Giroux, H. A. (1999). *The mouse that roared*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Johnson, S. M. (1996). *Leading to change: The challenge of the new superintendency*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Johnson, S. M., & Papay, J. R. (2010, May). Merit pay for a new generation. *Educational Leadership*, 49–52.
- Lemke, 1995)._Lemke, J. L. (1995). *Textual politics*. London: Taylor & Francis.
- Lukes (2005). *Human Rights, Power and Civic Action*. Taylor & Francis
- Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Houndsmills, U.K.: Palgrave Macmillan
- Mann, M. (1992). *The sources of social power*. Vol. 1. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Waite, D. (1995). Teacher resistance in a supervision conference. In D. Corson (Ed.), *Discourse and power in educational organizations* (pp. 71–86). Cresskill, NJ: Hampton Press